



Pemprov-BPK RI Teken MoU Pengolahan Data Berbasis Online

JAKARTA-RK. Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH mengatakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan data keuangan daerah yang benar, pemrov Kalbar bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah membuat nota kesepahaman atau MoU pengelolaan data dengan sistem online di Jakarta.

"Agar transparan dan akuntabilitas memang perlu dilakukan terobosan yang cepat dan mudah diakses secara online. Sebab penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Cornelis usai penandatanganan nota kesepahaman di Auditorium lantai 2 Gedung Tower BPK RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (16/4).

Menurut Cornelis, kerjasama antara BPK RI dengan Pemprov Kalbar dalam pelaporan e-Audit secara Online ini sangat membantu. Sehingga segala aktivitas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah mudah dikontrol. "Karena sistem online. Diharapkan lebih



Drs. Cornelis. 151

akuntabilitas dan tanspanaran," katanya.

Namun menurut mantan Bupati Landak ini, jika sudah menggunakan akses data secara online itu, tentu membutuhkan Sumber Daya Manusia yang baik untuk mengelolanya. "Kalau kita sudah menggunakan teknologi dan informasi yang cepat dan canggih, maka SDM manusia juga perlu ditingkatkan, kualitas SDM sangat menentukan bobot kerja yang

berkualias dan baik," jelas Cornelis.

Cornelis mengapresiasi langkah yang dibuat BPK RI tersebut. Untuk itu, agar kerjasama tersebut lebih bermanfaat, Cornelis seluruh bupati/walikota se-Kalbar dapat memanfaatkan akses online ini dengan baik. "Melalui data e-Audit secara online ini dapat mencegah kebocoran serta penyimpangan dalam kita mengelola keuangan daerah," pungkasnya. (dRe)